

## PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF: PERSPEKTIF MANAJEMEN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Oleh:

<sup>1</sup>Elisabeth Endang Prakosawati, <sup>2</sup>Boy Piter Nizu Kekri, <sup>3</sup>Muchamad Bachtiar,  
<sup>4</sup>Chajar Matari Fath Mala, <sup>5</sup>Sapto Jumono

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan  
Jl. Parangtritis No.5 No.KM.4, Druwo, Bangunharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa  
Yogyakarta 55187

<sup>2</sup>Universitas Cenderawasih  
Jl. Kamp Wolker, Yabansai, Kec. Heram, Kota Jayapura, Papua 99224

<sup>3</sup>IPB University  
Kawasan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

<sup>4</sup>Universitas Pembangunan Jaya  
Jl. Cendrawasih Raya, Blok B7/P, Bintaro Jaya, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten

<sup>5</sup>Universitas Esa Unggul  
Jl. Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510

e-mail: endang.moerdopo@sttkd.ac.id<sup>1</sup>, kekryboy@gmail.com<sup>2</sup>, muchamadBachtiar@apps.ipb.ac.id<sup>3</sup>,  
chajarmala@gmail.com<sup>4</sup>, sapto.jumono@esaunggul.ac.id<sup>5</sup>

---

### ABSTRACT

*This study aims to analyze inclusive economic development from a management and social welfare perspective, and examine the role of both in improving the distribution of social welfare. Inclusive economic development is a crucial issue because high economic growth is not necessarily accompanied by an equitable distribution of development outcomes. Therefore, an approach is needed that focuses not only on growth but also on access, participation, and social justice for all levels of society. This study uses a qualitative approach with descriptive methods through literature review. The data used are secondary data obtained from books, scientific journals, official reports, and related publications. The data analysis technique was carried out using the content method (content analysis), which includes the processes of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This approach aims to gain a comprehensive understanding of the concept and implementation of inclusive economic development in various contexts. The results show that inclusive economic development requires integration between management and social welfare aspects. From a management perspective, the application of good governance principles, data-driven planning, and strengthening human resource capacity are important factors in the success of development programs. Meanwhile, from a social welfare perspective, social protection programs, community empowerment, and MSME development play a role in reducing poverty and inequality. Furthermore, the development of digital technology provides opportunities to expand economic access, although barriers such as the digital divide remain.*

**Keywords:** *Inclusive Economic Development, Management, Social Welfare, Equity, Development Policy*

---

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembangunan ekonomi inklusif dari perspektif manajemen dan kesejahteraan sosial, serta mengkaji peran keduanya dalam meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi inklusif menjadi isu penting karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu diikuti oleh distribusi hasil pembangunan yang merata. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga pada akses, partisipasi, dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui studi literatur. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, dan publikasi terkait. Teknik analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis), yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dan implementasi pembangunan ekonomi inklusif dalam berbagai konteks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi inklusif memerlukan integrasi antara aspek manajemen dan kesejahteraan sosial. Dari perspektif manajemen, penerapan prinsip good governance, perencanaan berbasis data, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pembangunan. Sementara itu, dari perspektif kesejahteraan sosial, program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan UMKM berperan dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Selain itu, perkembangan teknologi digital memberikan peluang dalam memperluas akses ekonomi, meskipun masih terdapat tantangan berupa kesenjangan digital.

**Kata Kunci:** Pembangunan Ekonomi Inklusif, Manajemen, Kesejahteraan Sosial, Pemerataan, Kebijakan Pembangunan

---

## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu pilar utama dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selama beberapa dekade terakhir, berbagai negara, termasuk Indonesia, telah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi, investasi, serta penguatan sektor jasa dan perdagangan. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti oleh pemerataan kesejahteraan. Fenomena ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan serius, baik di tingkat global maupun nasional (Lastina, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan yang hanya berfokus pada pertumbuhan (growth-oriented) belum cukup untuk menjawab persoalan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks ini, konsep pembangunan ekonomi inklusif menjadi semakin relevan. Pembangunan ekonomi inklusif menekankan pada pentingnya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan, serta distribusi hasil pembangunan yang lebih merata. Tidak hanya berorientasi pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), pembangunan inklusif juga memperhatikan aspek keadilan sosial, akses terhadap sumber daya, serta kesempatan ekonomi yang setara. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi inklusif bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal (no one left behind) (Sunarso et al., 2025).

Di Indonesia, isu pembangunan inklusif menjadi semakin penting mengingat masih adanya kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah, serta antara sektor formal dan informal. Selain itu, tantangan seperti kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan akses terhadap pendidikan

serta layanan kesehatan juga masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya teratasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek pemerataan dan keberlanjutan (Nurullah, 2026). Dari perspektif manajemen, pembangunan ekonomi inklusif memerlukan strategi pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien, baik di sektor publik maupun swasta. Manajemen yang baik akan memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan dapat dirancang dan diimplementasikan secara tepat sasaran. Hal ini mencakup perencanaan yang partisipatif, pengorganisasian yang inklusif, pelaksanaan yang transparan, serta pengawasan yang akuntabel. Dengan demikian, prinsip-prinsip manajemen modern seperti good governance, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat penting dalam mendukung terciptanya pembangunan yang inklusif (Karunia, 2024).

Selain itu, peran manajemen sumber daya manusia juga menjadi kunci dalam mendorong pembangunan ekonomi inklusif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat akan membuka peluang yang lebih besar bagi individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, manajemen tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencapai efisiensi organisasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, perspektif kesejahteraan sosial menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi material tetapi juga non-material (Kharisma, 2025). Kesejahteraan sosial mencakup berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, serta hubungan sosial yang harmonis. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi inklusif harus mampu mengintegrasikan aspek ekonomi dan sosial secara seimbang. Program-program seperti perlindungan sosial, bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Haida et al., 2024).

Lebih lanjut, perkembangan globalisasi dan digitalisasi juga memberikan peluang sekaligus tantangan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif. Di satu sisi, teknologi digital dapat membuka akses yang lebih luas terhadap informasi, pasar, dan layanan keuangan. Namun di sisi lain, kesenjangan digital (digital divide) dapat memperlebar ketimpangan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan strategi manajemen yang mampu memanfaatkan teknologi secara inklusif, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya (Ulhak, 2025). Peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan kerangka kebijakan yang mendukung pembangunan inklusif. Kebijakan fiskal, moneter, serta regulasi yang pro-rakyat harus dirancang untuk mendorong pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan (Khoirunnisa & Firmansyah, 2025). Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan ekonomi inklusif. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan terciptanya sinergi yang dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan (Deliabilda et al., 2021).

Namun demikian, implementasi pembangunan ekonomi inklusif tidaklah mudah. Berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta kurangnya kapasitas manajerial di tingkat lokal seringkali menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas institusi, memperkuat sistem manajemen, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Dalam konteks akademik, kajian mengenai pembangunan ekonomi inklusif dari perspektif manajemen dan kesejahteraan sosial menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana pembangunan dapat dirancang dan dilaksanakan secara lebih adil dan berkelanjutan (Purba et al., 2025). Penelitian dalam bidang ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis, khususnya

dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Maulana & Arisandi, 2026).

Dengan demikian, latar belakang ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi inklusif bukan hanya sekadar konsep, tetapi merupakan kebutuhan yang mendesak dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di era modern. Pendekatan yang mengintegrasikan perspektif manajemen dan kesejahteraan sosial diharapkan dapat menjadi solusi dalam menciptakan pembangunan yang tidak hanya bertumbuh, tetapi juga merata dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.

## TINJAUAN PUSTAKA

Konsep pembangunan ekonomi inklusif berkembang sebagai respon terhadap keterbatasan paradigma pembangunan konvensional yang lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi semata. Menurut berbagai literatur, pembangunan ekonomi inklusif tidak hanya berfokus pada peningkatan output ekonomi, tetapi juga memastikan distribusi manfaat pembangunan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pada perluasan akses terhadap kesempatan ekonomi, seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan keuangan, terutama bagi kelompok rentan dan terpinggirkan. Dengan demikian, inklusivitas dalam pembangunan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu negara dalam mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.

Dari perspektif manajemen, pembangunan ekonomi inklusif memerlukan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), termasuk transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas. Teori manajemen modern menekankan pentingnya perencanaan strategis, pengorganisasian sumber daya, serta pengendalian yang sistematis untuk memastikan bahwa program pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan. Selain itu, manajemen sumber daya manusia memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas individu dan institusi agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi. Literatur juga menunjukkan bahwa kepemimpinan yang inklusif dan adaptif menjadi faktor kunci dalam mendorong implementasi kebijakan pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas.

Sementara itu, dalam perspektif kesejahteraan sosial, pembangunan ekonomi inklusif dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Teori kesejahteraan sosial menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan sosial, serta pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan yang berkeadilan. Program-program seperti bantuan sosial, jaminan sosial, serta pengembangan usaha kecil dan menengah menjadi instrumen penting dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Sejumlah studi juga menunjukkan bahwa integrasi antara kebijakan ekonomi dan sosial mampu menciptakan dampak yang lebih signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pendekatan multidimensi menjadi sangat diperlukan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep pembangunan ekonomi inklusif

dari perspektif manajemen dan kesejahteraan sosial. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai fenomena yang dikaji, terutama dalam konteks kebijakan, praktik manajerial, serta dampaknya terhadap masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, serta publikasi lembaga internasional yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis untuk memperoleh informasi yang valid dan terpercaya.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode analisis isi (content analysis). Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan, dibandingkan, dan diinterpretasikan untuk menemukan pola, hubungan, serta makna yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi inklusif. Proses analisis dilakukan secara bertahap, mulai dari reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Untuk menjaga validitas penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang berbeda. Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam serta rekomendasi yang relevan dalam mendukung pembangunan ekonomi inklusif yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi inklusif merupakan pendekatan yang semakin mendapatkan perhatian dalam perumusan kebijakan pembangunan, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, pembangunan inklusif tidak hanya diukur dari tingkat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, indikator seperti penurunan tingkat kemiskinan, berkurangnya kesenjangan pendapatan, peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi menjadi ukuran penting. Temuan ini menguatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa disertai pemerataan justru dapat memperlebar ketimpangan sosial.

Dari perspektif manajemen, keberhasilan pembangunan ekonomi inklusif sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan dan manajemen organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, memiliki kontribusi signifikan terhadap efektivitas program pembangunan. Misalnya, program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan partisipasi aktif warga cenderung lebih tepat sasaran dan berkelanjutan dibandingkan program yang bersifat top-down. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan manajerial yang inklusif mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendorong keterlibatan yang lebih luas dalam proses pembangunan (Andi & Hijrana, 2025).

Selain itu, perencanaan strategis yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang dirancang tanpa mempertimbangkan kondisi lokal seringkali tidak efektif dalam menjawab permasalahan yang ada. Oleh karena itu, pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) sangat diperlukan agar program pembangunan dapat memberikan dampak yang optimal. Dalam hal ini, peran manajer publik dan pembuat kebijakan sangat krusial dalam mengintegrasikan data sosial-ekonomi ke dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan (Huda et al., 2024).

Dari sisi manajemen sumber daya manusia, peningkatan kualitas SDM menjadi kunci utama dalam mendorong pembangunan ekonomi inklusif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dapat meningkatkan daya saing individu, sehingga mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, program pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada peningkatan keterampilan dan kewirausahaan juga terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya di sektor informal. Hal ini menunjukkan bahwa investasi pada SDM tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan sosial (Nurviliza, 2024).

Dalam perspektif kesejahteraan sosial, pembangunan ekonomi inklusif memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program perlindungan sosial, seperti bantuan tunai, subsidi, dan jaminan sosial, dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan daya beli masyarakat serta mengurangi kerentanan ekonomi. Namun demikian, efektivitas program tersebut sangat bergantung pada ketepatan sasaran dan mekanisme distribusi yang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan sistem manajemen yang baik untuk memastikan bahwa bantuan dapat diterima oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan (Luthfiani & Yazid, 2025).

Lebih lanjut, integrasi antara kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan inklusif. Hasil kajian menunjukkan bahwa negara yang mampu mengintegrasikan kedua aspek tersebut cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Misalnya, kebijakan yang mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus didukung dengan akses pembiayaan dan pelatihan akan memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan kebijakan yang hanya berfokus pada salah satu aspek saja. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan multidimensi sangat diperlukan dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Anjani et al., 2025).

Perkembangan teknologi digital juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi membuka peluang baru bagi masyarakat untuk mengakses layanan keuangan, pasar, dan informasi secara lebih luas. Misalnya, penggunaan teknologi finansial (fintech) dapat membantu pelaku UMKM dalam memperoleh akses pembiayaan yang sebelumnya sulit dijangkau. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa kesenjangan digital, terutama di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi digital serta infrastruktur teknologi agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara merata (Ulum, 2025).

Di sisi lain, tantangan dalam implementasi pembangunan ekonomi inklusif juga cukup kompleks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai hambatan, seperti keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya kapasitas manajerial di tingkat lokal. Selain itu, adanya kepentingan politik dan birokrasi yang kurang efisien juga dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah agar program pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien (Tri et al., 2025).

Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan inklusif. Hasil kajian menunjukkan bahwa masyarakat yang dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program cenderung memiliki rasa memiliki (*sense of ownership*) yang lebih tinggi, sehingga program tersebut dapat berjalan lebih berkelanjutan. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, karena masyarakat dapat berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan program pembangunan (Nurnaningsih, 2024).

Dalam konteks global, pembangunan ekonomi inklusif juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya dalam

upaya mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian tujuan tersebut memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif menjadi sangat penting dalam menciptakan sinergi yang dapat mempercepat pencapaian pembangunan inklusif (Depari, 2024).

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi inklusif memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi antara aspek manajemen dan kesejahteraan sosial. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh sejauh mana manfaat pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembangunan yang tidak hanya bertumbuh, tetapi juga adil dan berkelanjutan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Pembangunan ekonomi inklusif merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari peningkatan indikator makroekonomi, tetapi juga dari sejauh mana seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses dan merasakan manfaat dari proses pembangunan tersebut. Dengan demikian, pembangunan inklusif menjadi solusi strategis dalam mengatasi permasalahan ketimpangan sosial, kemiskinan, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Dari perspektif manajemen, penerapan prinsip tata kelola yang baik (good governance), perencanaan berbasis data, serta penguatan manajemen sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam mendukung efektivitas pembangunan ekonomi inklusif. Sementara itu, dari perspektif kesejahteraan sosial, integrasi kebijakan ekonomi dan sosial melalui program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan UMKM terbukti mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara lebih merata. Oleh karena itu, sinergi antara pendekatan manajerial dan kesejahteraan sosial sangat diperlukan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pembangunan ekonomi inklusif memerlukan komitmen bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan sistem yang adil, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan. Dengan strategi yang tepat dan implementasi yang konsisten, pembangunan inklusif diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, berkeadilan, dan berdaya saing di tengah dinamika global yang terus berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi, & Hijrana. (2025). Manajemen Kemiskinan Inklusif Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Detubuya*, 2(2), 206–225.
- Anjani, D. N., Ekawati, E., & Satriawan, D. (2025). Analisis Pembangunan Inklusif Dan Industrialisasi Terhadap Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 465–478.

- Deliabilda, S. A., Marlisa, V., Anditya, F. S., & Ariana, T. (2021). Penerapan Nilai-Nilai Ekonomi Pancasila Dalam Percepatan Ekonomi Inklusif Di Era Society 5 . 0 ( The Application Of Pancasila Economic Value In Acceleration Of Economic Pendahuluan Pendekatan Pembangunan Yang Terlalu Berorientasi Pada Pertumbuhan Telah. *Prosiding Emas: Ekonomi Manajemen Akuntansi Kewirausahaan*, 1(1), 1–20.
- Depari, E. T. (2024). Pembangunan Berkelanjutan : Integrasi Ekonomi ., *Mabis: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1), 1–13.
- Haida, N., Wahyuningsih, N., Islam, U., Bangsa, B., Berkelanjutan, T. P., & Review, L. (2024). Implementasi Sustainable Development Goals ( Sdgs ) Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam Abstract ., *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 11(1), 108–107.
- Huda, R. A., Puspita, R. A., Hasanah, S. N., & Malik, A. (2024). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Sebagai Negara Berkembang. *Kalianda Halok Gagas*, 7(2), 189–201.
- Karunia, U. (2024). Peran Dana Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(1), 146–152.
- Kharisma. (2025). Ekonomi Yang Bijaksana Dalam Menumbuhkan Kesejahteraan Sosial. *Al-Ulum: Multidisciplinary Journal Of Sciences*, 1(3), 254–259.
- Khoirunnisa, O., & Firmansyah, F. (2025). Strategi Pengelolaan Zifwaf Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Sosial Dengan Analisis Studi Lietartur 1. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 2(4), 934–942.
- Lastina, I. (2024). Peran Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial : Perspektif Dari Tafsir Ekonomi Islam. *Jurnal El-Kahfi (Journal Of Islamic Economic) Vol.*, 5(1), 103–111.
- Luthfiani, A. N., & Yazid, M. (2025). Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Teori Dan Praktik. *Center Of Economic Student Journal*, 8(1), 340–347.
- Maulana, E., & Arisandi, E. (2026). Strategi Manajemen Sdm Inklusif Dalam Mendukung Pencapaian Sdg 8 (Decent Work And Economic Growth) Bagi Pekerja Sektor Informal Di Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 180–190.
- Nurnaningsih, N. (2024). Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia Terhadap Pembagunan Ekonomi Inklusif Di Indonesia. *Jurnal Kewirausahaan*, 11(1), 54–63.
- Nurullah, M. (2026). Peran Umkm Dalam Penguatan Modal Sosial Dan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Indonesia : Perspektif Pendidikan. *Journal Of Educational Psychology And Social*, 1(1), 1–8.
- Nurviliza, O. (2024). Pengaruh Zakat Dalam Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Analisis Implementasi Pada Lazismu.Org. *Ziswaf Asfa*

*Journal*, 2(2), 163–180.

- Purba, A. A., Agelia, D. P., Natasya, N., & Tambunan, K. (2025). Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam. *Derivatif: Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(2), 1–13.
- Sunarso, B., Ade, M., Harahap, K., & Suparwata, D. O. (2025). Manajemen Kota Dan Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Pemanfaatan Sistem Informasi Bisnis : Tinjauan Pustaka Tentang Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengembangan Umkm Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(April), 336–345.
- Tri, D., Manik, S., Nasution, N. F., & Safitri, S. (2025). Aspek Ekonomi Dan Sosial. *Journal Of Management And Creative Business*, 3(1), 122–131.
- Ulhak, M. Z. (2025). Peran Zakat Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Untuk Mencapai Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif. *Baitul Maal*, 2(2), 169–179.
- Ulum, B. (2025). Peran Hukum Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat : Perspektif Indonesia. *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(1), 1–12.